

## Peluang dan Tantangan Pemanfaatan Literasi Digital dalam Optimalisasi Pendidikan Politik Mahasiswa PPKn UAD

Safiqa F<sup>1</sup>, Wardani<sup>2</sup>, Sofie N<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta, Indonesia

### INFORMASI ARTIKEL

Sejarah Artikel:  
Diterima:  
Disetujui:

#### Kata kunci:

Literasi digital  
Pendidikan politik  
Mahasiswa PPKn UAD

#### Keywords :

Digital literacy  
Political education  
PPKn students at UAD

### ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji peluang dan tantangan dalam pemanfaatan literasi digital untuk mengoptimalkan pendidikan politik mahasiswa Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKN) di Universitas Ahmad Dahlan. Literasi digital, yang mencakup kemampuan untuk memahami, menggunakan, dan mengevaluasi informasi dari berbagai media digital, sangat penting dalam membentuk wawasan politik mahasiswa di era digital saat ini. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus untuk mengeksplorasi persepsi mahasiswa dan dosen tentang integrasi literasi digital dalam kurikulum pendidikan politik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa literasi digital memiliki potensi besar untuk meningkatkan partisipasi politik, pemahaman isu-isu politik, dan keterlibatan dalam diskusi politik secara online. Namun, beberapa tantangan yang dihadapi meliputi keterbatasan infrastruktur teknologi, kurangnya keterampilan digital di kalangan mahasiswa, dan resistensi terhadap perubahan metode pembelajaran tradisional. Penelitian ini menyarankan perlunya pengembangan strategi pendidikan yang komprehensif dan berkelanjutan untuk mengatasi hambatan tersebut.

### ABSTRACT

This research examines the opportunities and challenges in utilizing digital literacy to optimize the political education of students in the Pancasila and Citizenship Education Study Program (PPKN) at Ahmad Dahlan University. Digital literacy, which encompasses the ability to understand, use, and evaluate information from various digital media, is crucial in shaping the political awareness of students in today's digital era. This research employs a qualitative method with a case study approach to explore the perceptions of students and lecturers regarding the integration of digital literacy in the political education curriculum. Research findings indicate that digital literacy has great potential to enhance political participation, understanding of political issues, and engagement in online political discussions. However, some of the challenges faced include limited technological infrastructure, a lack of digital skills among students, and resistance to changes in traditional learning methods. This research suggests the need for the development of comprehensive and sustainable educational strategies to address these obstacles.

## Pendahuluan

Indonesia merupakan salah satu negara dengan budaya politik demokrasi. Tingkat kualitas demokrasi yang substansial dapat dilihat dari partisipasi politik yang dilakukan di negara ini. Partisipasi politik dalam negara demokrasi merupakan indikator bahwa kedaulatan rakyat, atau pelaksanaan kekuasaan tertinggi oleh rakyat, berjalan dengan semestinya. Hal ini tercermin dalam keterlibatan masyarakat dalam proses demokrasi, seperti pemilihan umum (Pemilu). (Haerul et al., n.d.), yang memungkinkan rakyat untuk memilih wakil dan pemimpin yang memiliki visi, kualitas, serta tanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, politik menjadi alat oleh sekelompok orang atau pemerintah untuk mengubah suatu kebijakan atau mengubah tatanan masyarakat yang ada di negara. Penting bagi masyarakat untuk memiliki kesadaran politik atau dengan kata lain memiliki pengetahuan tentang politik, agar tidak mudah terprovokasi atau tertipu oleh kebijakan-kebijakan yang tidak mengutamakan kesejahteraan warga negara. Peran masyarakat sangat penting dalam suatu bangsa, karena berhasil atau tidaknya suatu pemilu ditentukan oleh

seberapa besar partisipasi masyarakat dalam pemilu, baik pemilu legislatif, pemilu presiden, maupun pemilu lokal. (Latif et al., n.d.)

Generasi muda dianggap sebagai agen yang memiliki potensi untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat. Tetapi, seringkali generasi muda menghadapi kendala dalam proses partisipasi karena kurangnya pemahaman dalam proses politik. Dalam hal ini, literasi digital dapat digunakan sebagai alat yang efektif untuk menjangkau partisipan dalam kegiatan politik. Oleh karena itu dalam era digital seperti saat ini, literasi digital menjadi hal yang penting diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam penguatan pendidikan politik bagi mahasiswa. Pemanfaatan literasi digital sebagai media penguatan pendidikan politik bagi mahasiswa merupakan strategi atau metode yang efektif untuk memperkuat demokrasi dan memberikan kesempatan yang lebih luas dalam pengambilan peran dan pengambilan keputusan.

Masyarakat, khususnya generasi muda yang aktif dan konsisten terlibat dalam dunia digital, lebih mudah mengakses informasi dan media terbaru melalui keterampilan komunikasi dan pemecahan masalah. Keterampilan ini mencakup lima kompetensi media digital seperti yang dijelaskan oleh Hobbs (2010: 17), yaitu:

1. **Mengakses:** Menemukan dan menggunakan alat media serta teknologi dengan terampil, sekaligus berbagi informasi yang relevan dengan orang lain.
2. **Menganalisis dan mengevaluasi:** Memahami pesan serta menggunakan pemikiran kritis untuk menilai kualitas, kebenaran, kredibilitas, dan sudut pandang pesan, sambil mempertimbangkan dampak atau konsekuensinya.
3. **Mencipta:** Menulis atau menghasilkan konten dengan memanfaatkan kreativitas dan rasa percaya diri yang didasarkan pada ekspresi diri, dengan kesadaran terhadap tujuan, audiens, dan teknik yang digunakan.
4. **Merening dan berefleksi:** Menerapkan tanggung jawab sosial dan prinsip-prinsip etika dalam membentuk identitas diri, pengalaman hidup, perilaku komunikasi, dan perilaku sosial.
5. **Berkolaborasi:** Bekerja secara individual maupun bersama untuk berbagi pengetahuan dan memecahkan masalah di lingkungan keluarga, tempat kerja, serta komunitas, baik di tingkat lokal, regional, nasional, maupun internasional.

Hal ini menunjukkan besarnya potensi yang dimiliki warga negara, terutama kaum muda, yang semakin signifikan jika diintegrasikan dengan pendidikan politik yang berkualitas. Melalui pendidikan politik digital yang tepat, pencapaian karakter dan perilaku yang mencerminkan partisipasi politik warga negara akan lebih mudah terwujud.

Berdasarkan pengamatan dan wawancara yang kami lakukan kepada mahasiswa PPKn UAD angkatan 2022, kami jumpai masih ada sebagian mahasiswa yang mudah terprovokasi oleh informasi yang kebenarannya belum bisa dipertanggungjawabkan, sehingga masih terdapat beberapa mahasiswa yang bersikap acuh terhadap kepentingan negara. Maraknya berita atau informasi negatif terhadap masing-masing Capres dan Cawapres yang diidentikkan dengan kepentingan kekuasaan dan dinasti politik sehingga menyebabkan keraguan di kalangan calon pemilih, terutama di kalangan mahasiswa yang mayoritas adalah pemilih pemula. Mereka merasa bahwa proses politik saat ini telah tercemar oleh ambisi pribadi dan kurangnya fokus pada kepentingan rakyat. Dengan maraknya isu-isu korupsi, nepotisme, dan penggunaan politik untuk kepentingan pribadi menyebabkan sebagian mahasiswa memilih untuk tidak memberikan suaranya di pemilu 2024. Golput dianggap sebagai bentuk penolakan terhadap sistem politik yang dinilai kurang transparan dan tereksplorasi oleh kepentingan elit (Taggala, 2017). Dalam konteks ini, latar belakang wawancara mencerminkan atmosfer politik yang memunculkan perasaan frustrasi dan kekecewaan di kalangan masyarakat, memotivasi sebagian dari mereka untuk memilih jalur golput sebagai bentuk protes terhadap dinamika politik yang dianggap tidak memihak kepada kepentingan rakyat.

Penelitian ini memiliki beberapa tujuan yaitu untuk mengetahui bahwa literasi digital dapat menjadi media perantara dalam memberikan pendidikan politik oleh dosen, peluang

dan hambatan apa saja yang akan dialami dalam memberikan pendidikan politik melalui literasi digital, serta memberikan pemahaman mengenai pentingnya pendidikan politik bagi mahasiswa dalam menyambut pemilu di tahun 2024 ini. Harapannya dengan adanya Pendidikan politik melalui literasi digital, mahasiswa dapat lebih selektif dalam mencari maupun menerima informasi mengenai dinamika perpolitikan di Indonesia, apalagi ditambah dengan pesatnya perkembangan internet membuat semuanya mudah diakses dan dilihat, mahasiswa haruslah lebih selektif dan teliti dalam menyikapi berbagai persoalan politik agar pemilu di tahun 2024 dapat berjalan dengan lancar.

## Metode

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif interpretatif dengan melibatkan mahasiswa PPKn Universitas Ahmad Dahlan Angkatan 2022 sebagai subyek utama penelitian. Metode kualitatif yaitu penelitian yang melibatkan pengumpulan data dengan mencari dari berbagai sumber seperti buku, jurnal, dan riset yang sudah ada. Langkah pertama yang kami lakukan adalah dengan mencari literatur jurnal yang berhubungan dengan pentingnya pendidikan politik bagi pemilih pemula, dan jurnal yang berkaitan dengan pemanfaatan literasi digital dalam pendidikan politik untuk kami analisis dan dijadikan sebagai bahan rujukan dalam penelitian ini. Sedangkan Metode interpretatif merupakan pendekatan penelitian yang memandang realitas sosial sebagai suatu keseluruhan yang kompleks, dinamis, dan sarat makna. Menurut Neuman (1997: 68), pendekatan interpretatif adalah sistem sosial yang memberikan makna terhadap perilaku melalui observasi langsung yang mendetail. Dalam metode interpretatif, peneliti menggunakan teknik wawancara kepada mahasiswa PPKn UAD angkatan 2022 mengenai peluang dan tantangan literasi digital dalam Pendidikan Politik Mahasiswa serta pengamatan partisipatif untuk kemudian dianalisis dan diambil kesimpulan. Dengan metode penelitian kualitatif interpretatif ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang mendalam dan kontekstual mengenai pendidikan politik yang dipahami mahasiswa guna menyambut pemilu 2024 mendatang agar tidak lagi mudah terpengaruh berita Hoax dan menjadi pemilih yang selektif demi terlaksananya pemilu yang akan datang serta bijak dalam menggunakan media sosial.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Yuliandri, Erna, dan rekan-rekan berjudul "Pendidikan Politik Melalui Penguatan Literasi Digital dalam Proses Pembelajaran Mata Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan", dijelaskan bahwa pendidikan politik melalui pendidikan kewarganegaraan dengan memanfaatkan literasi digital memiliki peranan yang sangat penting. Hal ini terutama untuk memudahkan mahasiswa dalam memahami hak dan kewajibannya sebagai warga negara, serta dalam mengamalkan nilai-nilai demokrasi.

Adapun persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai Pendidikan politik melalui literasi digital bagi mahasiswa dengan fokus pada peningkatan pemahaman mahasiswa terhadap hak dan kewajibannya sebagai warga negara dalam menyambut pemilihan umum di tahun 2024. Sedangkan perbedaannya adalah pada penelitian terdahulu data diambil dari berbagai prodi di Universitas Sebelas Maret dengan subyek utamanya hanya mahasiswa yang mengambil mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Sedangkan dalam penelitian ini difokuskan pada seluruh mahasiswa PPKn UAD angkatan 2022, dengan metode observasi dan wawancara secara mendalam yang diharapkan dapat meningkatkan pemahaman mengenai hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara dan tidak mudah terprovokasi terhadap informasi yang belum teruji kebenarannya sehingga dapat selektif dalam menyambut pemilu di tahun 2024 ini.

## Hasil dan Pembahasan

### Penguatan Literasi Digital dalam Pendidikan Politik

Pemilihan umum tahun 2024 merupakan agenda penting bagi bangsa Indonesia dalam memilih pemimpin negara, khususnya Presiden dan Wakil Presiden. Untuk mensukseskan Pemilu 2024, diperlukan adanya gerakan bersama secara masif, baik dari pihak pemerintah, penyelenggara dan pengawas pemilu, maupun masyarakat. Pemilu berfungsi sebagai wadah bagi kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, serta Presiden dan Wakil Presiden. Pelaksanaannya dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Setiap warga negara memiliki hak dan kedudukan yang setara untuk menyalurkan hak pilihnya dalam pemilihan umum ("Developing Nationalism Character among the Digital Native Generation through Formal Education in Indonesia," 2023).

Pemilihan umum diartikan sebagai upaya untuk mewujudkan hubungan demokratis antara warga negara dengan negara, serta antara warga negara dengan pemerintah. Sebagai negara demokrasi, yang berkedaulatan pada rakyat (Bachmid, 2020). Pemilu 2024 akan dilaksanakan secara serentak, seperti halnya Pemilu 2019. Dalam konteks ini, sosialisasi pemilu sebagai bentuk pendidikan politik perlu dilakukan oleh berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga pendidikan, dan partai politik, sebelum Pemilu 2024 diselenggarakan. Sosialisasi pemilu harus dilaksanakan sebagai upaya untuk memberikan pemahaman kepada warga negara dalam membentuk dan mengembangkan kompetensi kewarganegaraan, agar setiap individu memahami hak dan kewajibannya sebagai warga negara.

Sosialisasi pemilihan umum merupakan bentuk pendidikan politik bagi masyarakat. Pendidikan politik adalah proses pembelajaran yang bertujuan memberikan pemahaman kepada warga negara mengenai hak dan kewajibannya, termasuk partisipasi dalam pemilihan umum. Pemilu 2024 diperkirakan akan didominasi oleh pemilih pemula, terutama generasi milenial, yang sebagian besar masih awam dalam dunia politik. Kelompok ini banyak terdiri dari mahasiswa perguruan tinggi yang rentan terhadap pengaruh informasi hoaks dan ajakan ujaran kebencian melalui media sosial (Ahmad et al., 2019). Permasalahan yang dihadapi pemilih pemula, terutama mahasiswa, meliputi ketidakstabilan emosional yang membuat mereka mudah dipengaruhi oleh elit politik, rentan terhadap mobilisasi politik, serta sikap apatis terhadap kepentingan negara, yang berpotensi meningkatkan angka golongan putih dalam pemilihan umum.

Saat ini, kita berada dalam era digital yang menawarkan kemudahan bagi berbagai kalangan untuk mengakses informasi melalui internet, khususnya media sosial (Pratiwi et al., 2022). Bagi mahasiswa, penggunaan ponsel dan perangkat elektronik pendukung lainnya sudah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari, sehingga mereka rentan terhadap politisasi oleh kaum elit politik melalui media sosial. Kondisi ini memerlukan penanganan khusus agar dapat diantisipasi, sehingga diharapkan Pemilu 2024 dapat berlangsung dengan aman dan kondusif, serta menekan angka golput..

Sebagai mahasiswa yang menempuh pendidikan di perguruan tinggi, seharusnya lebih memahami hak dan kewajibannya sebagai warga negara, serta tidak mudah terprovokasi atau dipengaruhi oleh elit politik untuk melakukan tindakan yang melanggar hukum (Anggraeni, 2020). Pembelajaran di perguruan tinggi sejatinya merupakan wahana pendidikan politik yang

sangat efektif dan terstruktur, karena perguruan tinggi memberikan pemahaman kepada mahasiswa tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara, terutama melalui mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan, yang merupakan mata kuliah wajib bagi semua program studi (Yuliandari et al., 2023).

### **Pentingnya Pendidikan Politik di Kalangan Mahasiswa**

Pendidikan politik adalah kegiatan atau aktivitas yang bertujuan membentuk orientasi politik dan moral dalam diri setiap individu, sehingga dapat berpartisipasi secara maksimal dalam kepentingan masyarakat dan negara. Pemahaman politik bagi mahasiswa melalui mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan merupakan kajian mengenai demokrasi politik (Winarno, 2019). Pentingnya pendidikan politik terutama bagi mahasiswa PPKn UAD, terlihat dalam usahanya untuk menciptakan warga negara demokratis yang paham hak, kewajiban, dan batasan aturan. Melalui pemahaman ini, diharapkan kesadaran politik mereka dapat meningkat, mendorong partisipasi aktif, dan membangun tanggung jawab sebagai anggota masyarakat yang berintegritas. Dengan mengikuti pembelajaran pendidikan kewarganegaraan diharapkan setiap mahasiswa dapat aktif berkontribusi dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan, pemilihan umum, dan hal-hal lainnya, sehingga setiap warga negara terutama mahasiswa perlu terlibat dalam partisipasi politik untuk meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia.

Secara fundamental, penerapan pendidikan politik dalam pembelajaran mata kuliah Kewarganegaraan sangat penting untuk membentuk generasi muda yang aktif berperan dalam memajukan kesejahteraan masyarakat dan menanamkan karakter Pancasila. Pemahaman politik bagi mahasiswa melalui mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan mencakup kajian mengenai demokrasi politik, sebagaimana dinyatakan oleh Winarno (2019). Hal ini menunjukkan bahwa tujuan pendidikan politik adalah menciptakan warga negara yang demokratis dengan pemahaman yang baik tentang hak, kewajiban, serta aturan yang mengatur tindakan yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan..

### **Peluang dan Kendala Mahasiswa dalam pendidikan politik melalui Literasi digital**

Jika kemampuan literasi digital dan literasi politik yang dimiliki generasi muda sudah baik, maka kehidupan demokrasi Indonesia akan semakin menjadi lebih baik untuk ke depannya. Dengan kemampuan literasi pendidikan politik akan menciptakan generasi muda yang aktif dan efektif dalam berpartisipasi politik sebagai warga negara. Hadirnya generasi muda dalam partisipasi politik Indonesia merupakan sebuah harapan yang cukup besar, tentunya partisipasi politik tidak hanya tentang generasi muda yang aktif dalam kegiatan politik, pemuda yang aktif mengikuti pemilu, namun juga pemuda yang mengetahui tentang hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Banyak peluang yang dimiliki bagi generasi muda untuk berpartisipasi politik terutama melalui literasi digital. Salah satu cara untuk meningkatkan pemahaman politik adalah melalui literasi digital. Literasi digital memungkinkan mahasiswa mengakses informasi politik dengan cepat dan mudah melalui Internet.

Namun, kemampuan digital menawarkan peluang besar dalam pendidikan politik, terdapat juga beberapa kendala yang perlu diatasi. Salah satu peluang besar yang ditawarkan keterampilan digital kepada mahasiswa dalam pendidikan politik adalah akses yang lebih luas terhadap informasi politik. Internet memungkinkan pelajar dengan mudah mencari berbagai sumber informasi politik, mulai dari berita dan majalah hingga diskusi politik yang berlangsung di dunia maya. Ini akan memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang sistem politik, kebijakan publik, dan proses demokrasi. Selain itu, kompetensi digital juga memberikan

kesempatan kepada mahasiswa untuk berpartisipasi aktif dalam politik. Mereka dapat menyampaikan pendapat, berdiskusi, dan berbagi informasi politik kepada orang lain melalui media sosial. Dengan cara ini, mahasiswa dapat menjadi agen perubahan dengan mempengaruhi pandangan dan sikap politik masyarakat. Namun ada beberapa kendala yang perlu diatasi dalam pendidikan politik melalui kompetensi digital. Salah satunya adalah beragamnya informasi yang beredar di Internet. Mahasiswa harus memiliki keterampilan penting untuk memproses dan mengkategorikan informasi yang mereka terima. Mahasiswa harus bisa membedakan informasi yang valid dan akurat dengan media informasi atau berita palsu.

Di era globalisasi yang serba cepat saat ini, keterampilan ini sangat penting untuk mencegah mahasiswa terjerumus ke dalam kesalahan persepsi dan manipulasi politik. Hambatan lain yang dihadapi adalah kurangnya keterampilan digital siswa. Meskipun internet sudah melekat dalam kehidupan sehari-hari, banyak mahasiswa yang masih kurang memiliki keterampilan yang memadai untuk menggunakan teknologi secara efektif. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk meningkatkan keterampilan digital agar mahasiswa dapat memanfaatkan potensi pendidikan politik melalui keterampilan digital secara bermakna. Universitas dan pemerintah memiliki peran penting dalam mengatasi hambatan-hambatan tersebut. Universitas dapat memberikan pelatihan literasi digital kepada mahasiswanya untuk membantu mereka memanfaatkan teknologi dengan lebih baik. Sementara itu, pemerintah dapat memberikan dukungan dalam bentuk kebijakan dan program yang mendorong pendidikan kewarganegaraan melalui literasi digital.

## Simpulan

Pendidikan politik sangat penting agar mahasiswa dapat berpartisipasi secara optimal dalam kepentingan masyarakat dan negara. Hal ini membantu menciptakan warga negara demokratis yang memahami hak, kewajiban, dan batasan peraturan mereka. Pemahaman ini meningkatkan kesadaran politik, mendorong partisipasi aktif, dan membangun tanggung jawab. Pendidikan Kewarganegaraan adalah platform penting untuk pendidikan politik. Hal ini bertujuan untuk membentuk generasi yang berperan aktif dalam menesejahterakan masyarakat dan menjunjung tinggi nilai Pancasila. Keterampilan literasi digital dapat meningkatkan pendidikan politik secara signifikan. Hal ini memungkinkan mahasiswa untuk mengakses informasi politik dengan mudah dan berpartisipasi aktif dalam politik. Internet memberikan akses informasi politik yang lebih luas dan kesempatan bagi mahasiswa untuk menyampaikan pendapat, berdiskusi, dan berbagi informasi. Namun terdapat kendala dalam pendidikan politik melalui literasi digital. Beragamnya informasi online menuntut mahasiswa untuk membedakan informasi yang valid dan akurat dengan berita palsu. Kurangnya keterampilan digital adalah kendala lainnya. Universitas dan pemerintah dapat membantu dengan memberikan pelatihan literasi digital dan kebijakan yang mendukung.

## Referensi

Ahmad, T., Alvi, A., & Ittefaq, M. (2019). The Use of Social Media on Political Participation Among University Students: An Analysis of Survey Results From Rural Pakistan. *SAGE Open*, 9(3). <https://doi.org/10.1177/2158244019864484>

- Anggraeni, D. (2020). STRATEGI PENGAWASAN TERHADAP UJARAN KEBENCIAN DI MEDIA SOSIAL PADA PEMILU (Studi Kasus Pilgub DKI 2017). In *Jurnal Ilmu Hukum* (Vol. 1, Issue Oktober). <https://balitbangsdm.kominfo.go.id/publikasi-indikator-tik->
- Bachmid, F. (2020). Eksistensi Kedaulatan Rakyat dan Implementasi Parliamentary Threshold dalam Sistem Pemilihan Umum di Indonesia. *SIGN Jurnal Hukum*, 2(2), 87–103. <https://doi.org/10.37276/sjh.v2i2.83>
- Developing Nationalism Character among the Digital Native Generation through Formal Education in Indonesia. (2023). *Pegem Journal of Education and Instruction*, 13(3). <https://doi.org/10.47750/pegegog.13.03.09>
- Haerul, I., Kewarganegaraan, J. P., & Unsur, F. (n.d.). *PERANAN PENDIDIKAN POLITIK DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI POLITIK SISWA KELAS X DI MA AL-MUTHMAINNAH*.
- Latif, A., Sujipto, A., Husain Thamrin, S., Rakasiwi Syamsuddin, F., & Barat, S. (n.d.). *PENGUATAN PENDIDIKAN POLITIK BAGI KAUM MUDA POLEWALI MANDAR MENJELANG PEMILU 2024 Strengthening Political Education For Young People In Polewali Mandar Ahead Of The 2024 Elections*. <https://jurnal.forindpress.com/index.php/jamas>
- Pratiwi, H., Hasanah, N. I., Purnama, S., Ulfah, M., & Saripudin, A. (2022). Adaptation to digital parenting in a pandemic: A case study of parents within higher education. *South African Journal of Childhood Education*, 12(1). <https://doi.org/10.4102/sajce.v12i1.1166>
- Winarno, R. (2019). *Pembauran Kebangsaan Dalam Perspektif Pendidikan*. 2(1). <http://nursyam.uinsby.ac.id//p>
- Yuliandari, E., Muchtarom, Moh., & Widiatmaka, P. (2023). PENDIDIKAN POLITIK MELALUI PENGUATAN LITERASI DIGITAL DALAM PROSES PEMBELAJARAN MATA KULIAH PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN. *Kwangsan: Jurnal Teknologi Pendidikan*, 11(1), 186. <https://doi.org/10.31800/jtp.kw.v11n1.p186-205>
- Damanhuri, R. J., Berlian, M. F., & Ayu, A. K. Analisis Penguatan Literasi Digital Terhadap Peningkatan Partisipasi Politik Warga Negara Damanhuri1, Ronni Juwandi2, M. Fiqri Berlian3, Apriyani Kusuma Ayu4.
- Yuliandari, NI Putu Silvia, et al. "Pendidikan Karakter dan Moralitas Dalam Ajaran Catur Guru." *Metta: Jurnal Ilmu Multidisiplin* 3.1 (2023): 84-96.